

Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Subhan Riyadi - INDONESIASATU.ID

Feb 15, 2022 - 02:22



JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pernyataan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengajak kader PDIP dan Nahdiyin sebagai kelompok nasionalis dan religius untuk merapatkan barisan menghadapi pihak yang terindikasi hendak merusak narasi kebhinekaan dan kemajemukan.

Atas hal itu, LaNyalla meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya imigran dari Tiongkok yang semakin hari semakin banyak di Indonesia. Sebab, menurut LaNyalla, mereka jelas tidak memiliki rasa nasionalisme Indonesia dan juga bukan dari negara yang religius.

“Kan bangsa ini memang terdiri dari dua kelompok yang sudah menjadi satu kesatuan, nasionalis-religius. Bukan hanya PDIP dan NU saja. Karena bangsa ini diikat dalam Pancasila. Karena itu sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 29 Konstitusi kita jelas menyebut dasar negara ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” tukas LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, NU sudah sangat teruji memiliki saham yang besar dalam kelahiran dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama bila mengacu lahirnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU, KH Hasyim Asy’ari di Surabaya.

“Begitu pula elemen-elemen masyarakat yang lain. Semua sudah tertulis dalam sejarah kok. Termasuk sumbangsih kelompok non-muslim, kelompok keturunan Arab, juga para Raja dan Sultan Nusantara,” urainya.

Jadi, lanjut LaNyalla, jelas tidak ada tempat di negara ini bagi mereka yang tidak bertuhan dan tidak mencintai negerinya. Sehingga sudah sangat jelas, mereka yang tidak nasionalis-religius adalah bukan warga negara, karena memang mereka orang asing.

“Itulah ancaman sebenarnya. Orang-orang asing yang tidak nasionalis dan tidak religius yang terus masuk ke Indonesia. Jangan sampai framing yang muncul adalah perusak kebhinekaan adalah saudara sebangsa sendiri. Karena semua warga negara Indonesia pasti mencintai Indonesia,” imbuh Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu.

Ditambahkan LaNyalla, bangsa ini terpolarisasi dan terpecah justru karena adanya pembatasan calon pemimpin bangsa yang disepakati partai-partai politik. Sehingga dalam dua kali Pilpres, kita hanya diberi pilihan head to head dua pasang calon.

“Dan Pancasila sudah tidak lagi menjadi nafas dan denyut nadi dan nafas warga bangsa, karena sejak 13 November 1998, MPR telah mencabut TAP MPR tentang Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, karena dianggap sudah tidak sesuai dalam kehidupan bernegara,” tandasnya.

Seperti diberitakan Sabtu kemarin, Yaqut mengatakan bahwa kelompok Nasionalis dan Religius di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk memelihara narasi kebangsaan yang bercirikan kemajemukan.

Hal itu dikatakan Yaqut saat menghadiri kegiatan daring bertema Bersama Merawat Indonesia yang diselenggarakan PDIP demi memperingati hari lahir (Harlah) ke-96 Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu.

Yaqut mengatakan mereka para perusak bangsa ini ingin menghancurkan Indonesia. Dengan cara melenyapkan kemajemukan, kebhinekaaan di negeri ini.
(*)